

Kasus Covid-19 di Bogor Terkendali, RS Lapangan Dinonaktifkan

BOGOR (IM)- Mulai hari ini, RS Lapangan Kota Bogor secara resmi dinonaktifkan operasionalnya. Hal itu mengingat angka kasus penularan Covid-19 di Kota Bogor yang sudah mulai menurun dan terkendali.

"Hari ini, Rumah Sakit lapangan dinonaktifkan dulu, karena kebutuhannya sudah tidak ada lagi. RS ini kan didirikan karena ada kebutuhan tempat tidur yang sangat tinggi sekarang kasusnya sudah sangat terkendali, sudah jauh sekali di bawah WHO jadi tidak ada kebutuhan itu lagi. Semua sudah tercukupi di faskes, RS rujukan yang ada," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, kepada wartawan, Senin (19/4).

Bima menambahkan, RS Lapangan ini bisa saja kembali diaktifkan jika angka kasus covid-19 mengalami lonjakan dikemudian hari. Terutama untuk memenuhi kebutuhan tempat tidur pasien.

"Apakah akan diaktifkan lagi? Sangat tergantung dengan kebutuhan itu apakah ada tapi mudah-mudahan tidak ada karena terkendali," ungkapnya.

Kemudian, RS Lapangan ini juga akan dilakukan evaluasi dan assesment oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Inspektorat dan BPKP. Baik secara administratif maupun lainnya.

"Kita terus koordinasi dengan BNPB, nah BNPB yang

akan evaluasi dan assesment jadi secara administratif direview oleh Inspektorat oleh BPKP disampaikan nanti ke BNPB dan bersama mengkaji. Tapi kembali lagi kalau tidak ada kebutuhan maka tidak akan dilanjutkan. Tapi kita antisipasi jangan sampai ada gelombang kedua atau lonjakan. Kalau ada tentunya RS ini kembali dibutuhkan," jelasnya.

Di sisi lain, Bima menyebut bahwa RS Lapangan sangat efektif menanggulangi atau memenuhi kebutuhan tempat tidur pasien covid-19. Tercatat, sejak diresmikan pada Januari 2021 RS Lapangan telah merawat sebanyak 346 pasien covid-19.

"Sangat efektif, mengurangi penularan. Ada 346 yang dirawat di sini, 298 dinyatakan sehat sisanya dirujuk. Tidak ada yang meninggal di sini," tambahnya.

Setelah dinonaktifkan, para tenaga kesehatan (nakes) akan kembali bertugas di tempat sebelumnya dan yang berstatus kontrak disiyagakan. Sedangkan alat-alat kesehatan masih disimpan di RS Lapangan.

"Alat-alat masih tetep di sini, kan saya bilang semua standby semua siaga kalau ada panggilan tugas semua nakes kembali bertugas. Kalau situasi naik lagi ini akan aktifasi lagi," pungkas Bima. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

AKSES JALAN RUSAK DAN BERLUBANG

Pengendara melintas di jalan yang rusak serta berlubang di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/4). Menurut warga setempat rusaknya akses jalan menuju kawasan Pemerintahan Kabupaten Bogor tersebut sudah banyak menimbulkan kecelakaan.

Jatah BST Jokowi Dipotong, Emak-emak Lapori Polisi

Setahu saya program BST dari Presiden Jokowi tidak bisa dipotong atau dibagi dengan warga lain walaupun ada musyawarah luar biasa desa. Karenanya hari ini kami melaporkan dugaan potongan terhadap BST Jokowi ini ke Polres Bogor, ucap Tati Erawati, salah seorang warga penerima manfaat.

KLAPANUNGGAL (IM)- Belasan ibu-ibu rumah tangga penerima bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah pusat atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) melapor ke Polres Bogor.

Hal itu karena dana yang harusnya diterima Rp600 ribu diduga dipotong hingga Rp300 ribu karena alasan akan diberikan kepada warga lain yang belum menerima. Padahal BST dari Presiden Jokowi tidak bisa

dikurangi, tidak seperti BST yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

"Setahu saya program BST dari Presiden Jokowi tidak bisa dipotong atau dibagi dengan warga lain walaupun ada musyawarah luar biasa desa, hingga hari ini kami melaporkan dugaan potongan terhadap BST Jokowi ini ke Polres Bogor," ucap Tati Erawati warga RT 01 RW 02 Desa dan Kecamatan Klapanunggal kepada wartawan, Senin, (19/4).

Wanita berusia 62 tahun ini menerangkan kronologis dugaan pemotongan BST Jokowi. Saat warga usai mencairkan BST tersebut, ia dan kawan-kawan lainnya digiring

petugas Linmas ke salah satu ruangan.

"Habis mencairkan BST Jokowi, petugas Linmas Desa Klapanunggal menggiring kami, lalu petugas atau staf desa mengatakan dana BST tersebut dipotong untuk disalurkan ke warga lain yang belum mendapatkan. Dugaan pemotongan tersebut mendadak dan kami keberatan hingga datang ke Mako Polres Bogor," terangnya.

Ibu dua orang anak ini menjelaskan potongan BST Jokowi ini baru diduga pada Bulan April ini. Dua bulan sebelumnya ia dan kawan-kawan tidak mengalami pemotongan dari Pemdes Klapanunggal.

"Bulan Februari dan Maret,

BST Jokowi kami tidak mengalami potongan, kenapa di Bulan April ini malah tiba-tiba ada dugaan potongan dengan alasan yang tidak jelas dan diduga tidak sesuai aturan," jelas Tati.

Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Handreas Adrian mengaku belum mendapatkan laporan dari jajarannya, namun ia berjanji akan melakukan monitoring dan menyelidiki.

"Belum dapat laporan dari petugas yang piket, nanti kalau udah ada laporan dugaan pemotongan BSTnya baru kami monitor dan penyelidikan dugaan pemotongan BST Jokowi," ungkap AKP Handreas. ● **gio**

Gubernur Riau Sesalkan Ada Ustaz Ceramah Covid-19 Rekeyasa Israel

PEKANBARU (IM)- Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, ada seorang ustaz yang berceramah di dekat kediamannya dan menyebutkan Covid-19 merupakan rekeyasa Yahudi Israel. Syamsuar menyayangkan isi ceramah ustaz tersebut.

"Saya mendapatkan laporan di sebuah masjid Pekanbaru masih ada ustaz-ustaz yang ceramahnya menyampaikan Covid-19 rekeyasa dan kerjaan Yahudi, Israel. Padahal di Israel juga ada dan banyak kasus Covid-19," kata Syamsuar, Senin (19/4).

Syamsuar menyatakan ini usai saat rapat koordinasi terkait perkembangan Covid-19 bersama seluruh kepala daerah, kepolisian, kejaksaan dan dinas terkait. Rapat koordinasi dilakukan di gedung daerah Balai Serindit Pekanbaru.

"Harusnya ceramah itu isinya menyejukkan, bukan provokasi," kata Syamsuar.

Syamsuar meminta protokol kesehatan di tempat ibadah untuk diperketat. Pengetatan protokol kesehatan ketat itu, karena dia mendapat laporan ada ustaz yang ceramahnya tak benar. Ceramah dilakukan di salah satu masjid tidak jauh dari rumah Syamsuar.

"Itu ceramah yang tidak benar, sehingga masyarakat menilai Covid-19 sudah hilang," sesal Syamsuar.

Syamsuar mengatakan, ceramah itu disampaikan ustaz tersebut pada Rabu (14/4) pekan lalu. Dari pembelajaran itu, Syamsuar meminta ustaz untuk tidak ceramah dengan materi pemboghongan.

"Ada jemaah mengingatkan jangan ceramah itu, tapi ini masih ada di Pekanbaru. tentunya harus diwaspadai agar memberi pencerahan bagi ceramah tidak benar. Nanti kita MUI dan kepala daerah untuk melakukan pengawasan," jelasnya. ● **pra**

IDN/ANTARA



MASJID TERTUA DI KOTA JAMBI

Umat Islam berjalan keluar dari Masjid Al-Ihsaniyah atau Masjid Batu di Danau Teluk, Kota Jambi, Jambi, Senin (19/4). Masjid yang didirikan tahun 1880 Masehi di tepi Sungai Batanghari tersebut merupakan masjid tertua di Kota Jambi.

Insentif Nakes Covid-19 Belum Cair, Ridwan Kamil: Sedang Saya Telusuri

BANDUNG BARAT (IM)- Insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 di sejumlah daerah di Jabar sudah beberapa bulan belum dibayarkan. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengaku akan segera menelusuri penyebab mandeknya pencairan insentif nakes tersebut.

"Ini terjadi dimana-mana. Jadi sedang saya telusuri karena level insentif itu ada yang sebagian kewajiban kabupaten, sebagian provinsi, dan ada juga pusat," ungkap pria yang akrab disapa Kang Emil, di Bandung Barat, Senin (19/4).

Sekadar diketahui nakes di Bandung Barat yang terjun langsung menangani Covid-19 mengeluh lantaran mereka belum menerima insentif selama empat bulan sejak bulan Desember 2020 hingga Maret 2021.

Terkait insentif nakes di Bandung Barat, Kang Emil mengatakan akan menelusuri terlebih dahulu sumber insentifnya apakah oleh kabupaten, provinsi, atau pusat.

"Jadi yang KBB ditelusuri dulu itu jatah mana untuk dukungan terhadap nakes yang macetnya. Karena kita tahu KBB sedang ada permasalahan sehingga lini pelayanan publik dan birokrasinya sedang sedikit terganggu dengan masalah pak bupati," katanya.

Dia menantikan permasalahan keterlambatan pencairan nakes di Bandung Barat dan daerah lain di Jawa Barat bisa segera diselesaikan pada pekan ini.

"Jadi saya dorong supaya hak nakesnya yang luar biasa bekerja sebagai pahlawan selama

Covid-19 ini tidak terlambat. Komplain ini ada dari kabupaten lainnya, minggu ini coba saya urai dan selesaikan," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dacrah KBB, Asep Sodikin mengatakan keterlambatan itu lantaran adanya perubahan pola pembayaran. Jika sebelumnya insentif nakes Covid-19 dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, maka saat ini menjadi beban Pemerintah Daerah.

"Saya dengar ada insentif nakes yang belum cair, tapi sedang kita coba konfirmasi. Laporan dari Dinas Kesehatan bahwa kebijakan pusat insentif nakes jadi tanggung jawab daerah dulu kan tanggung jawab pusat," ungkap Asep.

Hingga saat ini pihaknya belum menerima surat dari pemerintah pusat terkait perubahan pola pembayaran yang dibebankan ke Pemerintah Daerah. Jika pun dibebankan pada Perintah Daerah, Asep akan melakukan perubahan APBD parsial.

Pihaknya mesti menunggu surat kebijakan dari pemerintah pusat tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan macetnya. Karena kita tahu KBB sedang ada permasalahan sehingga lini pelayanan publik dan birokrasinya sedang sedikit terganggu dengan masalah pak bupati," katanya.

"Kalau ada surat resminya nanti dari Dinkes dan itu bisa harus dilakukan. Kalau memang memungkinkan dan ada uangnya, bisa (perubahan) parsial kita lakukan. Perubahan parsial bisa asal ada normatifnya jelas, jadi instruksinya jelas," terangnya. ● **pur**

93.901 WARGA KOTA BOGOR SUDAH DIVAKSIN

Kadinkes: Sekarang Prioritasnya Lansia dan Tenaga Pendidik

BOGOR (IM)- Dinas kesehatan sudah melakukan vaksinasi Covid-19 kepada 93.901 orang atau 52,67 persen dari 178.279 warga Kota Bogor yang menjadi sasaran penerima vaksin. Para warga tersebut sudah disuntik vaksin pertama dari total sasaran teregistrasi 187.802 warga.

Sementara, jumlah penerima vaksin Covid-19 suntikan kedua ada 40.997 warga atau 23 persen. Berdasarkan update data, Sabtu 17 April 2021 pukul 20.30 WIB dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Rinciannya, untuk kategori sasaran SDM kesehatan dari 9.150 orang, hasil vaksinasi 1.848 orang (20,2 persen), vaksinasi 2.702 orang (29,5 persen).

Kategori lanjut usia (lansia) dari sasaran 95.371 orang, hasil vaksinasi 12.817 orang (30,22 persen), vaksinasi 2.936 orang (3,1 persen).

Kategori sasaran petugas publik dari sasaran 73.758 sasaran, hasil vaksinasi 1.56.600 (76,74 persen), vaksinasi 2.24.605 (33,36 persen).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno menjelaskan,

data tersebut berasal dari KP-CPEN. Untuk SDM kesehatan suntikan pertama data dari pihaknya sebenarnya sudah rampung.

"Untuk tenaga kesehatan banyak yang ditunda karena komorbid dan penyintas. Kriteria ini sebelumnya dikeluarkan dari penerima vaksin," katanya, Minggu 18 April 2021 malam.

Menyisihkan masih rendahnya angka vaksinasi sasaran lansia, menurut Retno dikarenakan baru dimulai satu bulan yang lalu. Pasalnya, kebijakan pusat awalnya lansia diprioritaskan hanya di ibu kota provinsi.

"Jadi saat itu kita mulai sasaran pelayan publik dulu. Sekarang prioritasnya lansia dan pendidik, pelayan publik di pending (tunda) dulu," jelasnya.

Untuk sasaran lansia yang bermukim di pusat kota menurutnya, antusias mengikuti vaksinasi. Sedangkan lansia yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor, seperti di Mulyaharja, Lawang Gintung, Harjasari, Situ Gede dan Ciluar banyak yang menolak vaksin karena takut divaksin, merasa tidak kemana-mana dan jauh dari fasilitas kesehatan (faskes).



IDN/ANTARA

PRODUKSI KERUPUK MIE MENINGKAT DI BULAN RAMADAN

Pekerja menyelesaikan pembuatan kerupuk mie di sentra industri kerupuk Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/4). Menurut pengusaha kerupuk setempat permintaan kerupuk mie pada bulan Ramadan mengalami peningkatan hingga 60 persen dari hari biasanya.

Sekda tak Masalah Jika Berdiri Kab. Bogor Barat dan Timur

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat memastikan pendapatan asli daerah (PAD) aman, meski wilayah barat dan timur dilakukan pemekaran yang kini berstatus calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB).

Kabupaten Bogor terdiri 41 kecamatan, yang nantinya 14 kecamatan ikut Kabupaten Bogor Barat dan tujuh kecamatan ikut Kabupaten Bogor Timur.

"Kabupaten Bogor sebagai induk tidak ada masalah. Aman termasuk sumber PAD," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, saat ditemui di Cibinong, ibu kota Kabupaten Bogor, kemarin.

Menurut dia, ketika PAD Kabupaten Bogor mencapai Rp 1,18 triliun, sumbangan pendapatan yang didapat dari wilayah barat hanya senilai Rp 103,7 miliar dan dari wilayah timur Rp 333 miliar. Sedangkan pendapatan paling besar tetap dari wilayah tengah sebanyak Rp 749 miliar. Karena itu, pihaknya tak masalah jika nanti berdiri dua kabupaten hasil pemekaran.

"Melihat perkembangan ekonomi di Cibinong Raya, Kawasan Lido, kawasan industri Gunungsindur

hingga pariwisata Puncak. Pokoknya pemekaran wilayah tidak berdampak negatif," ujar Burhanudin.

Dia menjelaskan, secara aspek kewilayahan, Bogor Barat dan Timur sudah layak menjadi kabupaten sendiri. "Apabila ada kemauan dari pemerintah, rasanya layak dan aman dari berbagai aspek kewilayahan," kata Burhanudin.

Hanya saja, sambung dia, selama tiga tahun suatu daerah yang memekarkan diri, masih bergantung kepada daerah induk, dalam hal ini Kabupaten Bogor. "Kalau dalam tiga tahun itu aspek-aspek kewilayahan dinilai tidak layak, sumber PAD tidak memadai, kesiapan SDM aparatur kurang dan lainnya, itu bisa saja daerah persiapan dikembalikan lagi ke induk," terang Burhanudin.

Dia mengatakan, selama tiga tahun berstatus daerah persiapan, ada tim penilai independen dan pemerintah pusat untuk melihat kelayakan sebuah daerah layak menjadi otonom atau tidak. "Kalau tim independen dan pemerintah pusat menilai tidak layak ya akan dikembalikan ke daerah induk dan tidak disetujui menjadi daerah otonomi baru lewat undang-undang," tutur Burhanudin. ● **gio**

DI AKHIR MASA JABATAN

Airin Serahkan Tiga Aset Polsek di Tangsel

TANGSEL (IM)- Di akhir masa jabatannya, Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany menyerahkan aset tanah yang digunakan tiga Polsek dan satu Pos Subsektor yang awalnya merupakan lahan milik Pemkot Tangsel kepada Polri di Polres Tangsel, Senin (19/4).

Turut hadir Kepala BPN Tangsel, Kepala Kejaksaan Negeri Tangsel, Kepala Pengadilan Agama, Ketua DPRD Tangsel dan perwakilan Dandim.

Kapolres Tangsel, AKBP Iman Imanuddin mengatakan, serah terima lahan yang diberikan ke Pemkot Tangsel ke Polri pada siang hari tersebut merupakan sebuah rezeki yang diperoleh.

"Kami tak lagi was-was lantaran takut terkena gusur Satpol PP. Lantaran Polsek Serpong, Polsek Pamulang, Polsek Ciputat Timur dan Possubsektor Jombang yang selama ini dipergunakan masih menumpang di aset milik Pemkot

Tangsel," ujar Iman. Ia berharap kedepan Possubsektor Jombang dapat dijadikan Polsek. Sebagai upaya pendorong untuk peningkatan kamtibmas dan lainnya.

Sementara Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany mengatakan, akuntabilitas pencatatan sebagai pendorong aset baik Pemkot dan unsur vertikal, seperti Polri memang diperlukan. "Ini juga satu mimpi saya, lahan Polsek Setu sudah siap digunakan, hanya saja karena situasi covid dananya terkena refofusing anggaran," ungkapnya.

Sedangkan lahan yang ideal, menurutnya seperti di wilayah Pondok Aren, di mana ada Koramil, Polsek, Kecamatan, Puskesmas dan lainnya dalam satu wilayah. "Saya berpesan kepada ketua DPRD untuk dilanjutkan. Setup kecamatan idealnya ada Polsek dan Koramil dan terimakasih untuk kolaborasi dan sinergitas forkopimda yang baik selama ini," imbuh Airin. ● **pp**